

## Demokrasi : Antara Harapan Dan Realitas

Igna Purnamasari, Rahmaudina Al Khanzah, dan Retno Retnawati

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana demokrasi di Indonesia apakah sudah berjalan sesuai dengan substansinya atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui *Library Research*, dimana data – data diambil dari sumber buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel serta opini yang diambil melalui website yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini. . Beberapa hal menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan demokrasi yang berlangsung yaitu perhelatan pemilu yang akan turut mendorong adanya politik identitas, yang artinya para politisi berupaya untuk mementingkan identitas seperti ras, suku, dan agama untuk meraih suara terbanyak. Mereka yang berlomba-lomba akan mengedepankan identitas untuk memenangkan hati masyarakat. Meskipun sudah banyak para tokoh dan pejabat menyuarakan akan bahaya yang dihadapi saat politik identitas terjadi kenyataannya sungguh berbeda. Sebaliknya politik identitas tetap menjadi isu yang terus mengalir, banyaknya peristiwa politik identitas yang terjadi di Indonesia menjadi hal yang perlu di waspadai.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Politik Identitas

---

Igna Purnamasari, Rahmaudina Al Khanzah, Retno Retnawati adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

### Corresponding Author :

Igna Purnamasari, Rahmaudina Al Khanzah, Retno Retnawati are student from Political Science and Social Science Faculty, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman baik suku, agama, ras, dan budaya. Menjadi negara yang majemuk tentu memiliki beragam perbedaan yang ada baik pendapat ataupun aspirasi dari setiap individu. Oleh karena itu sebagai negara yang demokratis setiap warga negara memiliki hak dalam hal kebebasan berpendapat serta berpolitik, memiliki kesempatan juga untuk dipilih dan memilih. Untuk melihat apakah demokrasi telah sesuai antara teori dan prakteknya tentu dengan memperhatikan bagaimana pesta demokrasi itu berlangsung. Akan tetapi demokrasi yang ada di tengah masyarakat kini tidak sepenuhnya berjalan dengan sempurna, banyak berbagai masalah yang dihadapi terutama proses demokrasi yang terjadi tidak terlepas dari adanya politik identitas.

Demokrasi yang berada di tengah-tengah masyarakat plural menjadi sebuah tantangan menghadapi persoalan. Beberapa hal menjadi persoalan utama diantaranya dalam pesta demokrasi yang berlangsung akan turut mendorong adanya politik identitas, yang artinya para politisi berupaya untuk mementingkan identitas seperti ras, suku, dan agama untuk meraih suara terbanyak. Mereka yang berlomba-lomba akan mengedepankan identitas untuk memenangkan hati masyarakat.

Di Indonesia sendiri politik identitas sangat marak terjadi, bisa dilihat jauh dari sebelum pelaksanaan pemilu dimulai, para politisi yang ingin mendapatkan kursi di parlemen akan berlomba menggunakan identitas agama yang dipakai. Agama dijadikan sebuah alat untuk berpolitik yang sebenarnya hal itu sangat dilarang. Seperti yang dikatakan oleh beberapa tokoh diantaranya mantan ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr Din Syamsudin bahwa identitas memang sesuatu yang sangat melekat pada diri setiap individu, tetapi politik identitas selalu dituduhkan kepada agama Islam dengan dalih mereka menggunakan agama sebagai alat kampanye politik<sup>1</sup>. Prof KH Zainal Abidin yang menjabat sebagai Ketua FKUB juga berpendapat jika politik identitas yang berbasis agama bukan hanya mengancam semangat nasionalisme yang akan membuat luntur tetapi juga dapat menghancurkan kerukunan umat beragama menjadi terpecah, identitas yang seharusnya dijadikan sebagai pemersatu justru menjadi alat pemecah bela saat ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.askara.co/read/2022/09/13/30911/politik-identitas-suatu-kewajaran-dalam-pemilu-2024> diakses pada tanggal 19 Desember pukul 05.00 WIB.

<sup>2</sup> <https://sulteng-antaranews-com.cdn.ampproject.org/fkub-sulteng-politik-identitas-berbasis-agama-merusak-kerukunan> diakses pada tanggal 19 Desember pukul 07.35 WIB.

Politik identitas selalu dibawah saat pesta demokrasi yang akan datang, ujaran kebencian yang bersifat SARA digunakan sebagai alat untuk mengalahkan lawan politiknya. Banyak perdebatan yang mengatakan bahwa politik identitas dapat dilakukan oleh siapa saja yang lebih parahnya ada sebagian orang menilai politik identitas itu sah – sah saja. Kondisi seperti itu semakin memberikan peluang besar bagi para oknum yang menggunakan politik identitas untuk alat ujaran kebencian. Politik identitas sangat dilarang keras oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai dapat merusak kerukunan dan keharmonisan umat beragama, tidak sedikit agama selalu digunakan sebagai alat berpolitik. Memecah belah keutuhan NKRI menjadi hal yang ditakuti saat politik identitas ini semakin tidak terkendali. Kondisi seperti itu menjadi hal yang perlu diwaspadai dan ditekankan oleh para politisi agar jangan sampai politik identitas dapat menciderai nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalamnya.

Melihat kenyataan yang ada tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, politik identitas sampai saat ini menjadi alat untuk mendulang suara terbanyak, membuat kubu ditengah masyarakat yang rukun. Seperti halnya peristiwa 212 yang terjadi di DKI Jakarta pada Tahun 2017 menjadi salah satu peristiwa terbesar di Indonesia saat agama umat muslim digunakan sebagai alat berpolitik. Tentu hal itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Bukan hanya itu saja banyak para politisi yang menjelang pemilu menggunakan atribut agama seperti peci, hijab, kopyah dan lainnya sebagai simbol mereka beragama untuk mendorong partisipasi masyarakat agar mendapatkan suara.

Dari penjelasan diatas yang telah disampaikan bahwa politik identitas menjadi salah satu alat berpolitik yang menggunakan identitas agama. Untuk melihat bagaimana demokrasi di Indonesia apakah sudah berjalan sesuai dengan substansinya atau tidak akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini berdasarkan pada fokus permasalahan tersebut diatas.

### **Landasan Teori**

Secara teoritis demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, artinya sistem pemerintahan sepenuhnya dibawah kedaulatan rakyat. Menurut (Schumpeter, 1942) bahwa demokrasi pada dasarnya adalah hasil dari proses dan mekanisme politik. Hasil yang baik dan demokratis hanya bisa diperoleh melalui proses dan metode tertentu. Dalam kata – katanya *“metode demokrasi adalah aransemen kelembagaan bagi pencapaian keputusan politik yang mana seseorang memperoleh kekuasaan untuk memutuskan*

---

*melalui perjuangan kompetitif memperebutkan suara rakyat*". Schumpeter juga menekankan bahwa demokrasi merupakan sebuah proses kompetisi untuk menemukan pemimpin, untuk memenuhi harapan serta kehendak publik hanya dapat dilakukan dengan kompetisi yang sehat dalam memperoleh kepemimpinan politik.<sup>3</sup>

Negara yang demokrasi ditandai dengan kebebasan warga negara untuk berpendapat, berpartisipasi dan berekspresi. Untuk melaksanakan demokrasi tentu ada kompetisi berpolitik untuk itu kompetisi mengharuskan partisipasi masyarakat baik dalam memilih pemimpin atau mengawasi kepemimpinan kepala negara terpilih. Dalam sistem politik demokratis, politik berarti seni bagaimana seseorang atau sekelompok orang meraih kekuasaan dengan cara meyakinkan para pemilih. Politik identitas dapat dipahami sebagai usaha seseorang atau sekelompok orang untuk meraih kekuasaan dengan memanfaatkan kesamaan identitas tertentu dengan mayoritas para pemilihnya.<sup>4</sup> Menurut (Agnes Heller, 1994) mendefinisikan bahwa politik identitas adalah gerakan politik yang fokus pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama. Akan tetapi politik identitas yang seharusnya untuk meraih kekuasaan, justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian.<sup>5</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena yang terjadi dilapangan secara faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui *Library Research*, dimana data – data diambil dari sumber buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel serta opini yang diambil melalui website yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>3</sup> Schumpeter, Joseph. 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London and New York: Routledge. Halaman 269.

<sup>4</sup> Mubarak, Husni. 2018. *Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia*. Jurnal Bimas Islam Vol.II No.II. Halaman 376

<sup>5</sup> Nasrudin, Juhana. 2018. *Politik Identitas dan Representasi Politik*. Jurnal Studi Agama-Agama Vol.I No.I. Halaman 37

## Larangan Dalam Melakukan Politik Identitas

Identitas sebagai politik pada dasarnya tidak masalah, karena itu bagian dari realita dari mana kita berasal, yang menjadi problem dikala identitas ini dimanipulasi untuk target-target politik dengan identitas lawan. Padahal kita hidup dalam sebuah pluralitas atau kemajemukan yang tidak bisa kita hindari. Dan kita juga tidak hidup dalam logika bila yang satu menang maka yang lain kalah sebagaimana apa itu politik terbuka. Dan yang paling berbahaya ialah politik identitas bisa mengesampingkan rasionalitas, dari hal ini akan banyak sekali rentetan akibatnya, bisa kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang sekadar populis.

Politik identitas memang sudah dilarang sejak terjadinya kasus pada Pilkada priode 2017-2022 yang diikuti oleh dua pasangan calon Anis-sandi dan Ahok-Djarot. Pasangan kandidat Ahok-Djarot memainkan identitas tionghoa dan sekaligus menjadi representasi dari ekonomi, ras dan agama tionghoa yang beragama katolik. Sehingga pasangan tersebut mengalami penurunan elektabilitas ketika dihadapkan pada kasus ahok yang terjerat hukum penistaan agama sehingga ada alasan mengapa politik identitas dilarang.

Oleh karena itu dari berbagai fakta sosial politik yang memperlihatkan bahaya politik identitas yang mengancam keutuhan NKRI, berikut adalah berbagai bahaya dari adanya politik identitas bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

1. Eksploitasi Agama Islam, identitas utama yang paling rentan bagi sebagian besar orang di republik Indonesia, praktik penyalahgunaan politik identitas simbolisme agama (Islam) dalam politik kebangsaan dan politik kebangsaan merupakan tugas kita bersama dan belum sepenuhnya berkembang. Bahkan saat ini, Islam sebagai “kekuatan politik resmi” di Indonesia tetap menjadi kekuatan paling dominan dalam menentukan perubahan politik, pembagian kekuasaan, bahkan perang saudara, pertarungan pemilihan umum dan/atau tidak ada pemilihan umum. pemilihan lokal. Bahkan pada kampanye pemilihan presiden 2022-2024 untuk demokrasi, nuansa perjuangan nyaris mengarah pada benturan antara Islam dan Pancasila.
2. Mengutip dari Kompasiana.com terdapat beberapa dampak bahaya politik identitas yaitu *Mengancam Keutuhan Negara*, yang memunculkan konflik politik yang mengatasnamakan Agama dalam seseorang yang menjadi tanda-tanda itu politik identitas yang semakin melekat di masyarakat. Sehingga saat ini menjelang pemilu 2024 yang banyak dijumpai masyarakat, yang lambat laun akan mencederai demokrasi. Ancaman terhadap integritas nasional saat ini semakin memprihatinkan karena alasan

politik Identitas yang mengistimewakan identitas agama semakin kental. Bahkan, bukan hanya politik identitas, namun beberapa kelompok kini mulai mempersoalkan ideologi negara. Tentu saja, ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi keutuhan negara. Sangat ironis mengapa partai politik pada Pemilu 2019-2022 justru mempersoalkan ideologi negara Padahal sebelumnya tidak ada, bahkan sebelum beberapa pemilihan langsung di era Orde Baru dan Reformasi, dan hingga pemilihan umum 2014, tidak ada yang mempertanyakan ideologi negara dan pemahaman tentang bahaya politik identitas di masyarakat. Hal ini harus diangkat karena isu SARA menyangkut emosi massa yang sebagian bahkan tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, seperti contoh pelanggaran norma sosial dan pelanggaran nilai-nilai sosial memperlakukan Pancasila.

3. Menimbulkan perselisihan, terjadi perselisihan di sekitar masyarakat terkait politik identitas saling klaim kekuatan masing-masing komunitas yang tidak akan selesai. Perdebatan tentang agama dan klaim ketuhanan tentu tidak akan pernah berakhir. bahkan, Bahkan seorang ateis yang memproklamirkan diri sendiri sulit menyangkal keberadaan Tuhan. Penjelasan Dostoyevsky yang sangat rasional, "Jika tidak ada Tuhan di alam semesta ini, maka jelaslah semua perbuatan logika. "Kutipan ini menawarkan penjelasan bahwa kebenaran bisa ada pada setiap orang kelompok, tetapi hanya Tuhan yang berhak menentukan kebenaran universal. Artinya untuk dimensi ketuhanan, sekelompok orang cenderung menegakkan kebenaran seperti kelompok lainnya. Semuanya bisa baik dan semuanya bisa buruk. Padahal, jika konflik identitas primordial ini dibiarkan terus, demokrasi kita akan seperti gurun dimana yang kuat menaklukkan yang lemah dan mayoritas berkuasa.<sup>6</sup>

### **Politik Identitas Di Indonesia Saat Ini**

Menjadi negara yang demokratis menjadi sebuah tantangan dalam menghadapi berbagai permasalahan serta konflik dalam kehidupan berpolitik. Perlu diketahui bahwa di Indonesia politik identitas tubuh begitu pesat. Peristiwa yang dinilai sebagai salah satu bentuk wujudnya politik identitas telah terjadi pada tahun 2017. Menjadi sebuah peristiwa terbesar yang pernah ada di Indonesia, banyaknya demonstrasi dari berbagai kubu politik yang menyebabkan berbagai konflik. Dalam setiap perhelatan pemilihan umum, salah satu isu yang paling menarik

---

<sup>6</sup> Leli Salman Al-Farisi. 2018. *POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila*. JURNAL ASPIRASI Vol. No. 2 Februari. Halaman 87

dan sering dijadikan bahan untuk dijual dipublik dan sering dimainkan untuk menyerang lawan politiknya adalah isu politik identitas.

Menjelang pemilu 2024 yang sudah dijadwalkan sudah tidak asing lagi saat terdengar isu politik identitas yang semakin kencang. Seperti kita ketahui bahwa dalam berpolitik dilarang menggunakan politik identitas dalam mendapatkan suara dalam pemilu. Sebab, jika politik identitas ini digunakan maka mereka yang menggunakan politik identitas akan menguntungkan bagi mereka yang menggunakan jalur politik sebagai jalan alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rangkaian agenda demokrasi. Politik identitas sudah lama sebagai narasi politik oleh sekelompok elit politik tertentu di Indonesia sebagai wacana instrumen untuk menggambarkan rasa kebencian dan ketakutan kalah pada pihak lawan politiknya agar bisa menurunkan citra dan menyudutkan pigur tertentu yang biasanya dinilai kuat dan berpotensi menang, bisa mengalahkan lawan lainnya sehingga perlu disudutkan dengan narasi tidak nasionalis dan intoleran.

Politik identitas yang ada di Indonesia selalu menggandeng agama islam sebagai salah satu cara mendapatkan suara terbanyak. ketika ormas Islam dan partai Islam mengkampanyekan pentingnya menyatukan pilihan politik umat Islam kepada tokoh elit Islam maka itu juga merupakan politik identitas, yang sering dilabelkan memakai politik identitas, walaupun banyak ulama setuju dengan politik identitas yang menawarkan doktrin dan idiologi Islam sebagai alat perjuangan pemersatu umat dan bangsa sebab umat Islam Indonesia telah dianggap telah memberikan pengaruh yang besar dalam kemerdekaan Indonesia.<sup>7</sup> Memang politik identitas selalu dilabelkan dengan para tokoh – tokoh agama terutama islam, padahal kita bisa lihat bukan hanya umat islam saja melainkan agama lain juga menggunakan agama sebagai alat berpolitik.

Mengutip dari pernyataan Sri Asturi Buchari bahwa Politik Identitas merupakan alat politik suatis etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya tekanan ketidakadilan politik yang sampai mereka rasakan.<sup>8</sup> Seperti halnya pernyataan dari Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menurutnya “Politik identitas yang menghalalkan agama dalam

---

<sup>7</sup> Masri, Abdul Rasyid. 2022. *Politik Identitas Menuju Pemilu Presiden*

<https://uinalauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-identitas-menuju-pemilu-presiden> diakses pada 22 Desember pukul 16.35 WIB

<sup>8</sup> Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Halaman 20

berpolitik dianggap hal yang berbahaya, dan bisa merusak sistem demokrasi di Indonesia”. Sebab agama yang menjadi korban dianggap politisasi agama berbahaya. Bukan hanya politisasi agama saja melainkan harus mewaspadaai bahayanya politisasi hukum, politisasi Kapital.

Mengutip dari RMOL.ID bahwa Pernyataan dari Presiden JokoWidodo yang mengharamkan adanya politik identitas dalam konteks Pilpres 2024. Yang secara tegas Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas. Politik Identitas dijadikan sebagai alat politik suatu kelompok untuk tujuan tertentu baik untuk perlawanan atau menunjukkan identitas jati diri kelompok tersebut. Himbauan yang dinyatakan oleh Presiden mencuri perhatian masyarakat saat ini. Salah satu capres yang telah diusung oleh partai Nasdem yakni Anies Baswedan telah menuai kritik atas apa yang telah dinyatakan oleh Presiden terkait himbauan dilarangnya menggunakan politik identitas agama. Hal itu dikarenakan pada saat Anies menjabat sebagai gubernur dengan diawali peristiwa 212 terkait Pilkada DKI Jakarta sebagai wujud politik idnetitas. Akan tetapi salah satu partai muslim yaitu PKB telah menyakinkan kepada publik bahwa pernyataan Presiden bukan hanya mengarah pada Anies, melainkan himbauan kepada seluruh para politisi di Indonesia. Berawal dari situ kita dapat memahami bahwa peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017 selalu menjadi bagian dalam himbauan agar hal itu tidak sampai terulang kembali. Melihat Indonesia negara yang besar dan kaya akan keberagaman agama, sukudan etnis, karena jika identitas dijadikan sebuah alat pertarungan untuk mencapai sebuah kekuasaan maka hal itu akan berdampak sangat besar bagi keutuhan Indonesia.

Dari penjelasan serta pernyataan para tokoh, dan pejabat tinggi Negara, tidak dapat dipungkiri bahwa politik identitas juga telah terjadi saat perhelatan pemilihan umum 2019 pada salah satu pasangan calon yaitu Ma’ruf Amin. Dari hasil analisis framing medcom.id telah terbukti bahwa kampanye Pilpres 2019 terdapat unsur politik identitas. Tentu kita tahu bahwa Wakil Presiden saat ini Ma’ruf Amin saat menjadi paslon pilpres mendapat banyak sorotan ketika pakaian yang dikenakan telah menunjukkan identitas seorang tokoh agama islam. Dengan begitu saat melakukan kampanye Ma’ruf Amin memilih berkunjung ke Pondok Pesantren untuk mendapatkan dukungan. Karena seorang tokoh agama sudah pasti akan melakukan strategi sesuai dengan identitas yang dimilikinya.

## **Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa negara yang demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan dan hak terhadap masyarakat. Beberapa hal menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan demokrasi yang berlangsung yaitu perhelatan pemilu yang akan turut mendorong adanya politik identitas, yang artinya para politisi berupaya untuk memementingkan identitas seperti ras, suku, dan agama untuk meraih suara terbanyak. Mereka yang berlomba-lomba akan mengedepankan identitas untuk memenangkan hati masyarakat.

Meskipun sudah banyak para tokoh dan pejabat menyuarakan akan bahaya yang dihadapi saat politik identitas terjadi kenyataannya sungguh berbeda. Sebaliknya politik identitas tetap menjadi isu yang terus mengalir saat ini di saat menjelang pemilu 2024. Banyak peristiwa politik identitas yang terjadi di Indonesia menjadi hal yang perlu di waspadai.

## Daftar Pustaka

- Syamsuddin Haris. 2014. *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Schumpeter, Joseph. 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London and New York: Routledge.
- Layla & Gafar. 2019. *Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 pada Medcom.id)*. Jurnal Koneksi Vol.3 No,2 Desember.
- Leli Salman Al-Farisi. 2018. *POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila*. JURNAL ASPIRASI Vol. No. 2 Februari.
- Mubarok, Husni. 2018. *Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia*. Jurnal Bimas Islam Vol.II No.II.
- Nasrudin, Juhana. 2018. *Politik Identitas dan Representasi Politik*. Jurnal Studi Agama-Agama Vol.I No.I.
- Masri, Abdul Rasyid. 2022. *Politik Identitas Menuju Pemilu Presiden* <https://uinalauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-identitas-menuju-pemilu-presiden> diakses pada 22 Desember pukul 16.35 WIB
- <https://sulteng-antaranews-com.cdn.ampproject.org/fkub-sulteng-politik-identitas-berbasis-agama-merusak-kerukunan> diakses pada tanggal 19 Desember pukul 07.35 WIB.
- <https://www.askara.co/read/2022/09/13/30911/politik-identitas-suatu-kewajaran-dalam-pemilu-2024> diakses pada tanggal 19 Desember pukul 05.00 WIB.